



Peran Dinas Pendidikan Povinsi Sumatra Utara dalam Upaya Pengembangan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Autis

The Role of The Nort Sumatra Provincial Education Office in The Development of Autistic State Special Schools (SLB)

Rani R Br Manurung, Irwan Nasution & Walid Musthafa*

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya jumlah anak berkebutuhan khusus, Sehingga jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) pun meningkat juga sudah berdiri di hampir setiap Kabupaten/Kota. Dari pernyataan diatas maka tidak menjadikan peran dinas pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah selesai, karena masalah pendidikan di Sekolah Luar Biasa (SLB) tidak hanya berkaitan dengan kuantitas namun juga kualitasnya. Hal ini berarti Dinas Pendidikan seharusnya juga memiliki peran dalam upaya pengembangan Sekolah Luar Biasa baik di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri maupun Sekolah Luar Biasa (SLB) swasta, Sebagaimana upaya peningkat SLB juga dapat memiliki kualitas yang baik. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui peran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam Upaya Pengembangan Sekolah Luar Biasa Negeri Autis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yaitu mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya yang terjadi. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Dalam Upaya Pengembangan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Autis adalah dengan melakukan Pengkoordinasian, Mengawasi dan Mengupayakan Pengelolaan Manajemen layanan agar lebih baik, Memantau dan melaporkan pembelajaran kinerja kepala sekolah dan kinerja guru, menyelenggarakan kebijakan, mengizinkan operasional tingkat pendidikan anak berkebutuhan khusus dan pemerataan pendidikan terhadap anak yang berkebutuhan khusus, bersosialisasi kepada orang tua ataupun masyarakat bahwa anak berkebutuhan khusus sangatlah penting mendapatkan pendidikan.

Kata Kunci: Peran Pemerintah; Sekolah Luar Biasa

Abstract

This research is motivated by the search for the number of children with special needs, so the number of Special Schools (SLB) has also increased and has been established in almost every district/city. From the above statement, it does not make the role of the North Sumatra Province education office complete, because the problem of education in special schools (SLB) is not only related to quantity but also quality. This means that the Education Office should also have a role in the development of Special Schools both in State Special Schools (SLB) and private Special Schools (SLB), as efforts to improve SLB can also have good quality. This study aims to see the role of the North Sumatra Provincial Education Office in the Development of Autism Special Schools. The research method used in this research is a qualitative research method with a descriptive approach that describes the actual situation. The data research method in this research is using observation, documentation, and interview methods and then the data is collected. From the results of this study, it can be seen that the role of the North Sumatra Provincial Education Office in the Development Effort for the Autistic State Special School (SLB) is to coordinate, supervise and strive for better service management, monitor, and report the performance of school principals and teacher performance, policies, operational policies for the level of education of children with special needs and equal distribution of education for children with special needs, socializing with parents or the community that children with special needs are very important to get education.

Keywords: Role of Government, Special School (SLB)

How to Cite: Manurung, R.R.B. Nasution, I. & Musthafa, W. (2022). Peran Dinas Pendidikan Povinsi Sumatra Utara Dalam Upaya Pengembangan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Autis. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan (JIAAP)*, 1(1) 2022: 45-51,

**E-mail: ranir4201@gmail.com*

ISSN [2828-6537](https://doi.org/10.31289/jiaap.v1i1.606)(Online)



PENDAHULUAN

Kebutuhan akan pendidikan adalah hak yang harus diakui dan dipenuhi bagi setiap warga negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pendidikan memiliki peran strategis yang sangat penting dalam pembangunan suatu bangsa. Banyak penelitian yang telah menegaskan bahwa kualitas suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang dimilikinya. Kualitas dan kemajuan suatu bangsa yang adil dan sejahtera erat kaitannya dengan pendidikan sebagai sarana pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan yang merata, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat merupakan kunci utama dalam menghadirkan perubahan positif (Buchari & Saleh, 2017; Harsanti, 2017; Mulyasa, 2021).

Di Indonesia, pengaturan mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur oleh beberapa Undang-Undang, antara lain UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, UUGD No. 14 Tahun 2005, dan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Ketiga Undang-Undang tersebut mengatur tentang tata cara penyelenggaraan pendidikan, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, maupun yang melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, bab IV pasal 5-11 secara jelas menguraikan hak dan kewajiban warga negara, orang tua, dan pemerintah dalam konteks pendidikan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga memberikan perhatian khusus terhadap penyediaan pendidikan bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus (Aziz et al., 2018; Salman et al., 2018).

Dengan adanya regulasi ini, diharapkan bahwa pendidikan di Indonesia dapat menjadi lebih inklusif dan mengakomodasi kebutuhan semua lapisan masyarakat, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Pendidikan yang merata, bermutu, dan relevan adalah prasyarat penting dalam membangun masyarakat yang adil dan maju. Oleh karena itu, peran pemerintah, orang tua, dan seluruh masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas sangatlah penting untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan (Fadilah et al., 2020; Kusmanto et al., 2020).

Eli M. Bower dalam (Delphie, 2006) menunjukkan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) memiliki peluang yang sama dalam mengikuti pendidikan inklusi karena kemampuan akademik mereka setara dengan anak-anak normal pada umumnya. Namun, untuk anak-anak dengan autisme, tantangan muncul dalam perkembangan awal mereka. Pada tahun pertama atau kedua kehidupan, anak-anak autisme seringkali terlihat seperti anak-anak normal. Namun, saat seharusnya mereka mulai berbicara dan mengucapkan kata-kata pertama mereka seperti "ayah" atau "ibu," mereka mengalami keterlambatan dalam perkembangan berbicara tersebut. Selain itu, anak-anak autisme juga mungkin mengalami keterlambatan dalam perkembangan kemampuan lainnya (Maulana, 2008). Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk menyadari adanya perbedaan dalam perkembangan anak mereka sejak dini (Suharyanto, 2015).

Penjelasan di atas menggarisbawahi pentingnya pendidikan dalam kehidupan manusia, mulai dari awal kelahiran hingga akhir hayat (konsep "long life education"). Pendidikan inklusi dapat menjadi sarana yang efektif untuk memastikan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan belajar seperti anak-anak normal. Dengan pemahaman dan dukungan yang tepat, anak-anak dengan autisme dan kebutuhan khusus lainnya dapat mengatasi tantangan-tantangan dalam perkembangan mereka dan mencapai potensi mereka yang sebenarnya dalam proses pendidikan yang inklusif (Hartanto, 2020).

Menurut Soejono Soekanto dalam bukunya yang berjudul "Sosiologi: Suatu Pengantar" (Soekanto, 1982), peranan adalah salah satu aspek yang sangat dinamis dalam konteks kedudukan atau status individu dalam suatu masyarakat. Pengertian ini mengindikasikan bahwa peranan tidak hanya merupakan sebuah label atau tanda dalam struktur sosial, tetapi juga melibatkan tindakan nyata yang dilakukan oleh individu dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan atau status mereka (Suharyanto, 2016).

Peranan muncul sebagai hasil dari interaksi sosial dan memiliki sifat yang sangat terstruktur. Ini berarti bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki peranan tertentu yang diharapkan oleh masyarakat dan dirinya sendiri. Peranan ini dapat timbul karena seseorang menduduki jabatan atau posisi tertentu dalam suatu organisasi atau lembaga, seperti jabatan sebagai seorang guru, dokter, atau petani. Selain itu, peranan juga dapat muncul karena adanya kantor-kantor atau posisi sosial yang sudah ada dan mudah dikenali oleh masyarakat.

Penting untuk diingat bahwa individu dalam masyarakat tidak hanya menjalankan peranannya secara mekanis. Kepribadian individu, nilai-nilai, norma, dan sikap juga memainkan peran penting dalam cara seseorang menjalankan perannya. Misalnya, dua individu yang memiliki peran yang sama sebagai guru dapat menjalankan peranan mereka dengan gaya yang berbeda berdasarkan kepribadian dan nilai-nilai pribadi masing-masing.

Dalam konteks yang lebih luas, peranan tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan. Peranan juga terkait dengan peran sosial, seperti peran sebagai seorang anak, pasangan, atau warga negara. Setiap peran ini memiliki harapan, tanggung jawab, dan tindakan yang terkait dengannya. Peranan timbul karena kesadaran individu bahwa mereka tidak hidup dalam isolasi, melainkan selalu berinteraksi dengan lingkungan sosial mereka. Oleh karena itu, pemahaman dan pengakuan terhadap peranan ini sangat penting dalam menjaga harmoni dan keseimbangan dalam masyarakat.

Dalam pandangan Mintzberg yang diuraikan oleh (Thoah, 2010) peran dalam konteks manajemen dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Peran Antar Pribadi (Interpersonal Role):** Peran ini menggambarkan bagaimana seorang atasan berinteraksi dengan orang lain dalam organisasi. Ada tiga peran yang termasuk dalam kategori ini. Pertama, sebagai tokoh (*figurehead*), atasan berperan sebagai simbol formal atau representasi resmi organisasi yang dipimpinnya. Kedua, sebagai pemimpin (*leader*), atasan berperan dalam mengarahkan dan memotivasi anggota tim atau bawahan untuk mencapai tujuan organisasi. Ketiga, sebagai penghubung (*liaison*), atasan berperan dalam menjalin hubungan yang baik dengan pihak eksternal, seperti mitra bisnis atau lembaga pemerintah.
2. **Peranan Yang Berhubungan Dengan Informasi (Informational Role):** Peran ini menekankan pada peran atasan dalam mengumpulkan, memproses, dan menyebarkan informasi di dalam organisasi. Atasan sering kali berperan sebagai monitor, yaitu mengumpulkan informasi tentang kinerja dan perkembangan organisasi. Selanjutnya, atasan berperan sebagai penghubung atau diseminator, mengkomunikasikan informasi yang diperoleh kepada pihak yang berkepentingan dalam organisasi. Terakhir, atasan berperan sebagai juru bicara (*spokesperson*), mengkomunikasikan informasi kepada pihak eksternal seperti media atau pemangku kepentingan.
3. **Peran Pengambil Keputusan (Decisional Role):** Dalam peran ini, atasan terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang penting bagi organisasi. Ada empat peran utama dalam kategori ini. Pertama, sebagai inisiator (*entrepreneur*), atasan berperan dalam mengidentifikasi peluang dan inisiatif baru untuk meningkatkan kinerja organisasi. Kedua, sebagai pemecah masalah (*disturbance handler*), atasan berperan dalam menangani konflik dan masalah yang muncul dalam organisasi. Ketiga, sebagai pembuat keputusan (*resource allocator*), atasan berperan dalam alokasi sumber daya seperti anggaran dan personel. Terakhir, sebagai negosiator (*negotiator*), atasan berperan dalam bernegosiasi dengan pihak eksternal untuk kepentingan organisasi.

Mintzberg mengemukakan bahwa pembagian peran dalam manajemen sebenarnya digunakan untuk membantu atasan dalam proses pembuatan strategi organisasi. Dengan memahami dan menjalankan berbagai peran ini, seorang atasan dapat mengelola organisasi secara lebih efektif. Penting untuk diingat bahwa peran-peran ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan berdampak satu sama lain dalam konteks hubungan sosial di dalam organisasi (Mintzberg, 1989).

Berdasarkan hal itu maka penelitian ini berjudul Peran Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Utara Dalam Upaya Pengembangan Sekolah Luar Biasa Negeri Autis, untuk mengetahui bagaimana peran dinas dan faktor penghambat dinas pendidikan. Berdasarkan observasi peneliti di SLB Negeri Autis mengenai interaksi yang terjadi pada anak autis. Anak autis tersebut sudah mampu mengeluarkan suara dan berbicara walaupun ujarannya belum jelas. Anak autis tersebut belum dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Terkadang anak tersebut menyentuh bagian-bagian yang sensitif pada orang lain. Anak autis ini masih sering menirukan ucapan orang yang mengajak berbicara, kontak mata juga masih sangat kurang. Apabila kita hendak mengajak berkomunikasi kita harus menyentuh bahu dan memfokuskan pandangan anak tersebut.



METODE PENELITIAN

Penulisan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang memerlukan pemahaman secara mendalam dan berfokus kepada peran dinas pendidikan provinsi sumatera utara dalam uapaya pengembangan sekolah luar biasa (SLB) Negeri autis. Menurut (Sugiyono, 2019) metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandasan pada filsafah positivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah(sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambil sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dengan triangulasi data (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil peneliti kualitatif menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian ini dilakukan Jl. Teuku Cik Ditiro No.1-D, Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara.

Penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang komprehensif. Berikut adalah jenis-jenis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

Observasi: Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Menurut (Sugiyono, 2019), observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Pengamatan ini dilakukan secara langsung pada objek penelitian tanpa partisipasi aktif dari peneliti. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mencatat gejala-gejala yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Wawancara: Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan dialog antara pewawancara (peneliti) dan responden (informan) dengan tujuan memperoleh informasi yang mendalam. Menurut (Arikunto, 2013), wawancara adalah cara tanya jawab yang dilakukan secara tatap muka. Dalam konteks penelitian ini, wawancara digunakan untuk mendapatkan data, keterangan, pandangan, serta pendapat dari responden yang relevan dengan fokus penelitian.

Dokumentasi: Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dilakukan dengan mencari informasi dari berbagai dokumen dan sumber tertulis yang relevan dengan penelitian. Menurut (Arikunto, 2013), dokumentasi mencakup pencarian data dari catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sumber-sumber lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data berupa catatan, dokumen, transkrip, buku, serta peraturan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data dari sumber-sumber ini digunakan untuk mendukung dan melengkapi informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

Dengan menggabungkan ketiga teknik pengumpulan data ini, penelitian ini bertujuan untuk meraih pemahaman yang komprehensif mengenai masalah yang diteliti. Observasi memberikan gambaran langsung tentang situasi di lapangan, wawancara mendalami pandangan dan pengalaman responden, sementara dokumentasi memberikan dukungan berupa data tertulis yang relevan. Kombinasi ketiga teknik ini diharapkan dapat menghasilkan data yang berkualitas dan menjawab pertanyaan penelitian dengan baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Dalam Upaya Pengembangan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Autis

Sebelum peneliti mewawancarai informan terlebih dahulu peneliti melakukan observasi atau pengamatan terhadap gejala-gejala yang diteliti. Adapun indikator yang dipakai peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah indikator dari dalam (Thoha, 2010), dimana dimensi yang melekat pada peran diopersionalkan sebagai berikut:

1. Peran Antar pribadi (*Interpersonal Role*)

Indikator ini sangat penting dalam melihat suatu peranan, dalam peranan antar pribadi, atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolahnya berjalan dengan lancar.

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara mengadakan Sosialisasi untuk meningkatkan Sumber Daya Kepala Sekolah dan Guru SLB di Sumatera Utara Memfasilitasi Sarana dan prasarana yang dibutuhkan Sekolah Luar Biasa di Sumatera Utara, antara lain : Alat Pendidikan, Rehabilitasi Ruang Kelas, penambahan ruang kelas, bantuan belajar ABK Dinas Pendidikan berperan dalam mengadakan kerjasama antara Sekolah Luar Biasa dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri Dinas Pendidikan berperan aktif dalam pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap pendidikan di Sekolah Luar Biasa”

Peran dinas pendidikan provinsi Sumatera Utara dalam pengembangan Pendidikan SLB Negeri Autis ini sangat perhatian dimana dinas pendidikan memberikan perhatiannya dalam bentuk pengoperasionalan dari pada SLB negeri autis Sumatra Uatara dari hanya besifat kreatifis menjadi Sekolah Luar Biasa, yang dimana bisa melayani anak-anak autis dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Dan juga saat ini ada TK LB Autis

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan terhadap Sekolah Luar Biasa dan meningkatkan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan terhadap tenaga pendidikan khusus.

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa wawancara (Interpersonal Role) Peran Antar pribadi adalah dimana Dinas Pendidikan memberikan perhatian yang lebih terhadap perkembangan sekolah Autis yang megadakan sosialisasi dan melengkapi sarana dan prasrana yang akan dibutuhkan

2. Peranan Yang Berhubungan Dengan Informasi (*Informational Role*)

Informasi mengenai kemajuan pelaksanaan pekerjaan didalam organisasi, dan semua peristiwa yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut

Bidang Pendidikan Khusus menyatakan bahwa Pembinaan terhadap Kepala Sekolah dan Guru SLB dengan mengadakan pertemuan, bimbingan, monitoring dan pemberian sanksi dan reward terhadap Kepala Sekolah dan Guru SLB. Adanya Sosialisasi terkait pengembangan terhadap Sekolah Luar Biasa. Adanya Sosialisasi untuk pengembangan kapasitas guru guna meningkatkan kualitas pembelajaran

Langkah-langkah yang diberikan Dinas Pendidikan, memberikan motivasi supaya pendidikan Autis Sumatra utara ini berkembang baik dengan, pertama mengurus surat izin operasional SLB negeri Autis, yang mana ini peran dari pada kepala dinas melalui Ka. Bidang Pembina pendidikan pelayanan khusus memberikan motivasi kepada kami sebagai pimpinan disini sehingga kita mengajukan pengurusan izin itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan arahan bapak kepala dinas melalui Ka. Bidang Pendidikan Khusus (PK)."

Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pendidik dan tenaga pendidikan sekolah pendidikan khusus. dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan program kerja tenaga pendidikan khusus.

Proses pembelajaran, ada beberapa hal yang harus di perhatikan yakni kesiapan seorang guru, strategi mengajar, serta pendekatan pembelajran yang tepat kepada siswa. Proses pembelajaran di SLB Negeri Autis tidak jauh berbeda dengan sekolah-sekolah pada pada umumnya.

3. Peranan Pengambil Keputusan (*Decisional Role*),

Dalam peranan ini atasan harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang di pimpinnya. Mintzberg berkesimpulan bahwa pembagian besar tugas atasan pada hakikatnya digunakan secara penuh untuk memikirkan sisitem pembuatan strategi organisasinya

Keputusan yang diberikan dinas pendidkan terhadap pengembangan sekolah luar biasa yaitu dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 dalam uu ini penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip, yakni pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan mengembangkan kreavitas peserta didik tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Sarana dan prasarana yang tersedia dan Guru yang tersedia, Dukungan masyarakat dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran, Dukungan Dunia Usaha dan Dunia Industri.

Melaksanakan monitoring yang rutin ke sekolah autis untuk mengacu perkembangan pendidikan pelayanan autis di SUMUT. Sehingga Kami pihak SLB selalu berkoordinasi dengan dinas melalui dinas pendidikan, baik ditingkat cabang maupun ditingkat provinsi dibidang pendidikan pelayanan khusus. Disamping itu kami di permudahkan dengan adanya bapak ibu pengampuh yang mana memantau bagaimana perkembangan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri autis ini khususnya komunitas itu berjalan dengan baik.

Menyelenggarakan kebijakan, mengizinkan oprasional tingkat pendidikan anak berkebutuhan khusus. dan pemeratan pendidikan terhadap anak yang berkebutuhan khusus bersosialisa kepada orang tua ataupun masyarakat bahwa anak berkebutuhan khus sangat lah penting mendapatkan pendidikan



Faktor-Faktor Penghambat Dan Pendukung Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Dalam Upaya Pengembangan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Autis

Faktor penghambat merupakan hal-hal yang mempengaruhi bahkan bisa menghentikan sesuatu menjadi lebih dari sebelumnya, berdasarkan dari hasil pebelitian maka yang menjadi faktor penghambat dalam pengembangan sekolah luar biasa negeri autis yaitu

1. Kurangnya Guru yang berpendidikan PLB Akibat kurangnya tenaga pengajar tersebut terpaksa saat ini tenaga pengajar untuk sekolah berkebutuhan khusus seperti Sekolah Luar Biasa (SLB) masih didominasi guru tamatan non PLB. Jadi hampir rata-rata guru yang mengajar di SLB adalah guru yang bukan seharusnya
2. Masih kurangnya Dana dalam mengadakan kegiatan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidikan, sarana-prasarana di SLB negeri autis belum dimasukkan kedalam anggaran APPD maupun di dalam kegiatan kantor dinas sehingga SLB negeri autis belum mempunyai kelengkapan fasilitas sarana-prasarana dalam bentuk notulen dan lain-lain. Sehingga masih menggunakan apa yang ada selama ini di pusat layanan autis itu berjalan.
3. Kurangnya kesadaran dan kesiapan orang tua siswa dalam upaya pemberian pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus, orang tua atau keluarga sebagai pemberi layanan utama terhadap anak berkebutuhan khusus, pada umumnya masih kurang mempunyai kesadaran dan tanggung jawab untuk memberikan persamaan hak dan kesempatan bagi anak-anak tersebut. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan orangtua atau keluarga tentang bagaimana merawat, mendidik, mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut. Orangtua atau keluarga merupakan faktor terpenting dalam memfasilitasi tumbuh kembang dan perlindungan anak berkebutuhan khusus.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan bahwa peran dinas pendidikan dalam upaya pengembangan sekolah luar biasa di SLB Negeri Autis dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Peran dinas pendidikan melakukan pengkoordinasian, mengawasi dan mengupayakan pengelolaan manajemen layanan agar lebih baik selain itu juga, bidang pembinaan pendidikan khusus sangat berperan dalam fasilitas pengembangan kelembagaan, pemenuhan sarana dan prasarana pengembangan kurikulum dan pembinaan kesiswaan pendidikan khusus /autis.
2. Untuk tahap pengawasan yaitu memantau dan melaporkan pembelajaran kinerja kepala sekolah dan kinerja guru menyelenggarakan kebijakan, mengizinkan oprasional tingkat pendidikan anak berkebutuhan khusus dan pemerataan pendidikan terhadap anak yang berkebutuhan khusus bersosialisasi kepada orang tua ataupun masyarakat bahwa anak berkebutuhan khusus sangat lah penting mendapatkan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*.
- Aziz, A., Aisyah, K., & Siswanto, P. (2018). *The Relationship Between Self Regulated Learning with*. 10(1), 7–13.
- Buchari, A., & Saleh, E. M. (2017). Merancang pengembangan madrasah unggul. *Journal of Islamic Education Policy*, 1(2).
- Delphie, B. (2006). Pembelajaran anak berkebutuhan khusus. *Bandung: Refika Aditama*.
- Fadilah, R., Parinduri, S. A., Syaimi, K. U., & Suharyanto, A. (2020). Islamic guidance and counseling to overcome the study difficulty of junior high school students in SMP IT Nurul Azizi Medan (Case study of students experiencing anxiety). *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(Special Issue 1), 1154–1160. <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24SP1/PR201262>
- Harsanti, A. G. (2017). Pendidikan karakter melalui pembelajaran sastra. *Fkip E-Proceeding*, 623–636.
- Hartanto, D. (2020). *Institusi Inklusif Primum Non Nocere Kesejahteraan Sosial Primum Non Nocere Social Welfare Inclusive Institution*. 9(2), 119–129.
- Kusmanto, H., Suharyanto, A., Prayoga, Y., Purnamawati, I. G. A., & Nugraha, N. A. (2020). Understanding young political and comprehensive tax program in ASEAN. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(6), 1811–1814.
- Maulana, M. (2008). Mendidik Anak Autis dan Gangguan Lain Menuju Anak Cerdas dan Sehat. *Yogyakarta: Kata Hati*.
- Mintzberg, H. (1989). *Mintzberg on management: Inside our strange world of organizations*. Simon and Schuster.

- Mulyasa, H. E. (2021). *Implementasi kurikulum 2013 revisi: dalam era industri 4.0*. Bumi Aksara.
- Sala, S., Isnaini, I., & Adam, A. (2022). Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana di SD Negeri 1 Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 252–263. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1191>
- Salman, I., Warjio, W., & Isnaini, I. (2018). Analisis Bantuan Operasional Sekolah Kepada Yayasan Perguruan Almanar Desa Kelambir Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 8(1), 18. <https://doi.org/10.31289/jap.v8i1.1576>
- Septiandika, V., & Kurdianingtiyas, A. (2022). Evaluasi Pelaksanaan Program Jam Ekstra Layanan Administrasi (Jelita) di Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2680–2687. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1151>
- Soekanto, S. (1982). *Sosiologi: suatu pengantar*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Suharyanto, A. (2015). Pendidikan dan Proses Pembudayaan dalam Keluarga. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 162–165.
- Suharyanto, A. (2016). Surat Kabar Sebagai Salah Satu Media Penyampaian Informasi Politik pada Partisipasi Politik Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 6(2), 123. <https://doi.org/10.31289/jap.v6i2.1051>
- Thoha, M. (2010). *Birokrasi Politik di Indonesia*. Rajawali Press.
- UU. Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU. Nomor 77/P Tahun 2007

